

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Raja grafindo Persada.

Arief Mansur Dikdik. M dan Elisatris Gustom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 168

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimiologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuady Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Hamka, 2016, *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit.

Maria Farida Indrati S, 1996, *Ilmu Perundnag-undangan*, Jakarta: Kanisius.

Mertokusumo Sudikno, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan.

Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cetakan kesembilan

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo, cetakan kesebelas.

Saidi muhammad Djafar dan eka merdekawati djafar, 2008, *Hukum keuangan negara teori dan praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, Edisi ketiga

Sajdijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogtakarta: Lakbang Persindo.

SoerjonoSoekanto, 2007, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rineka Putra, Cetakan keempat.

Tan Malaka, 2014, *Muslihat, Politik dan Rencana Ekonomi Berjuang*, Jakarta: PT Buku Seru.

Makarao Taufik, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Putra, Cetakan kedua.

Wiryo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Penegakan Hukum Acara Pidana;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Hukum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;

16. Putusan Mahkamah Agung Nomor 375PK/Pdt/2015.

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Rido Putra Amri, 2015, *Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710k/Pdt/2010 Atas Ganti Rugi Oleh Instansi Pemerintah Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Padang.

Zulkipli, 2011, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum.

D. WAWANCARA

Alvian, S.H Kabid Bidang Propam (BIDPROPAM) Kepolisian Sumatera Barat.

E. WEBSITE

<https://news.detik.com/berita/3267401/ma-hukum-polri-bayar-1rp-300-juta-karena-anggotanya-salah-tembak-warga>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dbcf06b6/erbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d30131f6c92a/ganti-kerugian-korban-kesewenang-wenangan-penegak-hukum-oleh--firdiansyah/>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14214/uang-pengganti-2-eksekusi-dan-masalah-tanggung-renteng/>

